

**PELAKSANAAN TUGAS SEKSI KEAMANAN DAN KETERTIBAN RUMAH  
DETENSI IMIGRASI (RUDENIM) PEKANBARU**

**IMPLEMENTATION OF SECURITY AND ORDER IN THE IMMIGRATION  
DETENTION PEKANBARU**

M.Redho Zainal<sup>1</sup>, Dia Meirina Suri<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Indonesia

Email : [diameirinasuri@soc.uir.ac.id](mailto:diameirinasuri@soc.uir.ac.id)

**Abstrak :** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Pelaksanaan Tugas Seksi Keamanan dan Ketertiban di Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah pengamanan, pelayanan dan disposisi dari seksi keamanan dan ketertiban. Metode penelitian dilakukan secara deskriptif kuantitatif dengan populasi penelitian ini yaitu Kepala Rudenim, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, Kepala Subseksi Keamanan, Kepala Subseksi Ketertiban, Komandan Jaga Keimigrasian, serta Deteni. Dan keseluruhan Populasi tersebut dijadikan sampel dimana Kepala Rudenim adalah sebagai *key informan* serta seksi keamanan dan ketertiban menggunakan teknik sampling *purposive*. Kemudian untuk deteni peneliti menggunakan teknik Proporsional Stratified Random Sampling membagi populasi menjadi kelompok- kelompok kecil yang tidak tumpang tindih tetapi mewakili seluruh populasi. Pengumpulan data melakukan wawancara dengan informan, pengumpulan data dengan responden dilakukan dengan penyebaran kuisioner, serta dokumentasi dan observasi penulis untuk melihat bagaimana pelaksanaan tugas seksi kewanaman dan ketertiban Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru analisis menggunakan teknik data pesentase untuk mengetahui berapa persen responden yang menjawab terlaksana, cukup terlaksana dan kurang terlaksana. Maka berdasarkan dapat disimpulkan bahwa penelitian Pelaksanaan Tugas Seksi Keamanan dan Ketertiban Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru berada pada kategori “Cukup Terlaksana”, sesuai dengan tanggapan responden.

**Kata Kunci :** Seksi Keamanan dan Ketertiban, Rumah Detensi Imigrasi

**Abstract:** *This study aims to analyze how the Security and Order Section of the Pekanbaru Immigration Detention Center is carried out. In this study, the benchmark used is to pay attention to security, service and disposition of the security and order section. The population in this study were the Head of Rudenim, Head of Security and Order Section, Head of Security Subsection, Head of Order Subsection, Commander of Immigration Guards, and Detainees. And the entire population is used as a sample where the Head of the Rudenim is a key informant and the security and order section uses a purposive sampling technique. Then for the detainees, researchers used the Proportional Stratified Random Sampling technique to divide the population into small groups that do not overlap but represent the entire population. Data collection conducted interviews with informants, data collection with respondents was carried out by distributing questionnaires, as well as documentation and author observations to see how the implementation of the tasks of the security and order section of the Pekanbaru Immigration Detention Center analyzed using the percentage data technique to find out how many percent of respondents answered it was carried out, quite implemented and not implemented. So based on it, it can be concluded that the research on the Implementation of the Security and Order Section of the Pekanbaru Immigration Detention Center is in the "Sufficiently Implemented" category, according to the respondents' responses.*

**Keywords:** *Security and Order Section, Immigration Detention Center.*

## PENDAHULUAN

Administratori adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan keseluruhan proses pelaksanaan tugas yang telah diberikan, dan proses ini sering dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pusat administrasi terletak di dalam organisasi. Menurut Gullick (dalam Usman, 2013:486), organisasi adalah sarana untuk memfasilitasi pertukaran informasi antar individu yang bekerja sama dalam lingkungan kolaboratif. Hal ini memungkinkan adanya koordinasi pekerjaan yang dilakukan oleh pimpinan organisasi dari atas sampai ke bawah dalam hierarki organisasi.

Secara efektif mengelola berbagai kegiatan dalam suatu organisasi, sistem manajemen diperlukan. Sistem ini terdiri dari serangkaian proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pemantauan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui penggunaan berbagai metode seperti pengembangan sumber daya manusia dan metode lainnya. Setiap organisasi memiliki kegiatan yang beragam, namun dalam organisasi publik terdapat administrator publik yang bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan publik. Pengurus ini harus dikelola secara efektif agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efisien dan efektif. Negara adalah organisasi berskala besar di mana semua aparatur pelayanan publik melayani masyarakat umum. Sumber pendanaan utama organisasi ini berasal dari pemerintah.

Pemerintah rakyat adalah lembaga rakyat yang memiliki kemampuan untuk mendorong interaksi manusia dalam masyarakat dan untuk mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat secara keseluruhan. Pemerintah rakyat adalah alat rakyat yang memiliki kemampuan untuk mendorong interaksi manusia dalam masyarakat dan untuk mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat secara keseluruhan. Istilah "bangsa" mengacu pada organisasi yang ada di dalam wilayah geografis tertentu dan memiliki kemampuan untuk meningkatkan keadaan keuangan negara relatif terhadap pemerintah lain dan untuk melaksanakan tujuan tertentu bagi warganya.

Indonesia merupakan negara yang memiliki posisi strategis dalam hubungan internasional, baik dari segi geografi maupun potensi manusianya. Akibatnya, jumlah orang yang tinggal di wilayah tenggara dan barat Indonesia, serta yang tinggal di wilayah utara dan barat, semakin meningkat, sehingga lebih mudah diakses. Tingkat perdagangan dan mobilitas manusia antar negara diperkirakan akan meningkat di tahun-tahun mendatang, seiring dengan semakin terhubungnya dunia dan semakin maraknya globalisasi.

Pertahanan negara yang merupakan salah satu fungsi terpenting suatu bangsa adalah setiap kegiatan yang bertujuan untuk menjaga keamanan negara, seperti mempertahankan perbatasan negara, mempertahankan kedaulatan negara, dan mempertahankan kedaulatan negara dari ancaman eksternal. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, pemerintah negara telah menetapkan lebar pintu dan memberikan akses masuk dalam lingkup Negara. Sebagai akibat dari globalisasi pada setiap sektor kehidupan masyarakat sehari-hari, serta munculnya teknologi baru di bidang informasi dan komunikasi, aspek hubungan kemanusiaan telah berkembang dari tingkat nasional ke tingkat internasional, yang mengakibatkan munculnya seperangkat persyaratan baru untuk memastikan perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia di seluruh dunia. Selain itu, aspek hubungan kemanusiaan telah berevolusi dari nasional.

Meskipun Indonesia termasuk dalam kelompok negara penghasil suaka dan pengungsi dalam jumlah besar, seperti Malaysia, Thailand, dan Australia, negara ini mengalami perlambatan laju pertumbuhan penduduk (mixed population movement). Sebanyak 13.745 orang dari 50 negara akan terdaftar sebagai pengungsi di Indonesia hingga akhir Desember 2020, dengan mayoritas berasal dari Afghanistan dan mencari perlindungan melalui United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) (United Nations High Commissioner for Refugees). pengungsi).

Perlindungan yang ditawarkan oleh UN High Commissioner for Refugees (UNHCR) dimulai dengan jaminan bahwa pengungsi dan pencari suaka tidak akan mengalami refoulement (yakni

perlindungan dari pemulangan kembali secara paksa ke tempat asal mereka di mana hidup atau kebebasan mereka terancam bahaya atau ). Meningkatkan kewaspadaan para pengungsi dalam mengidentifikasi suaka dan pengungsi agar mereka dapat diidentifikasi dan dapat memberikan dokumentasi khusus mereka.

Seseorang yang telah diidentifikasi sebagai pengungsi dapat mengajukan permohonan untuk penetapan status pengungsi melalui proses yang diawasi oleh Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR), yang dikenal sebagai Proses Penentuan Status Pengungsi atau Proses Penentuan Status Pengungsi (RSD). Setelah itu, pencari suaka akan diberi pengarahan tentang apakah mereka telah diberikan status pengungsi atau tidak, serta sifat situasinya. Dalam hal permintaan perlindungan ditolak, prosedur prosedural RSD akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memenuhi ulang (banding).

Bagi mereka yang telah menerima status pengungsi, Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) akan mencari salah satu dari tiga solusi komprehensif. Menurut kebijaksanaan konvensional, solusi yang mungkin dilakukan antara lain penempatan di negara tuan rumah, secara sukarela (jika konflik di negara tuan rumah sudah meletus), dan integrasi lokal di negara tetangga tuan rumah.

UNHCR, di sisi lain, bekerja keras untuk menemukan solusi alternatif bagi krisis pengungsi global, yang mencakup segala hal mulai dari mengidentifikasi penyebab krisis hingga menemukan solusi yang sesuai dengan situasi yang dihadapi. Mereka juga mencari solusi yang komprehensif, seperti beasiswa universitas dan kemungkinan kemampuan komunitas untuk mengorganisir diri dalam menghadapi kesulitan dan kekurangan sumber daya di negara tuan rumah.

Individu dan kelompok dapat mengambil manfaat dari berbagai solusi jangka panjang. Solusi jangka panjang adalah proses yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi tentang situasi dan keadaan pikiran seseorang atau kelompok. Solusi yang telah diidentifikasi adalah solusi yang sesuai dengan kebutuhan setiap pengungsi.

Ada beberapa status yang diberikan oleh United Nation High Commissioner for Refugee (UNHCR) :

1. Para imigran tanpa status (Unregistered) adalah imigran yang, saat datanya ditempatkan oleh pihak UNHCR, ternyata di negaranya tidak terjadi perang dan yang lainnya bahkan tidak tercatat dalam data UNHCR sebagai imigran (PBB). Menurut beberapa sumber, orang-orang yang dimaksud adalah para imigran yang menyebabkan kebuntuan dalam proses keimigrasian dengan menghancurkan segala dokumen yang mungkin ada pada diri mereka.
2. Imigran Pencari Suaka (Asylum Seeker) adalah imigran yang telah ditempatkan oleh pihak United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) karena di negaranya terjadi perang dan imigran tertindas baik dari segi sosial, politik, dan ekonomi dan para Dalam hal ini, Imigran akan mendapat manfaat dari PBB, dan jika ada negara ketiga yang mau menerima manfaat tersebut, status Imigran akan berubah menjadi pengungsi.
3. Pengungsi adalah pendatang yang telah diberikan suaka di negara lain agar dapat hidup dalam kondisi yang lebih menguntungkan daripada di negara asalnya. Mereka akan terus menerima manfaat dari PBB. 4. Pengungsi (Pengungsi) adalah istilah yang digunakan untuk menyebut seorang imigran yang telah diberikan suaka di negara lain agar dapat hidup dalam kondisi yang lebih menguntungkan daripada di negara asalnya.

Indonesia merupakan satu-satunya negara yang belum meratifikasi Konvensi Hak Anak 1951 dan Protokol Hak Anak 1967. Menurut undang-undang (Undang- Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian), pengungsi lintas batas yang dianggap sebagai imigran ilegal yang berada di wilayah Indonesia, mengakibatkan tindakan administrasi yang diambil oleh pihak

keimigrasian (otoritas imigrasi). Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Imigrasi No. IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 Tentang Penanganan Imigran Ilegal, disebutkan bahwa imigran ilegal, pengungsi, atau bahkan pencari suaka dapat ditahan dan ditahan di rumah tahanan yang dikenal sebagai sebuah Rumah Detensi Imigran. Tujuan Rudenim yang juga dikenal sebagai Rumah Detensi Imigran ini adalah (Rudenim).

Karena Indonesia tidak memiliki undang-undang khusus yang mengatur tentang pengungsi, hal ini bertolak belakang dengan pengaturan imigran ilegal dalam perjalanan ke Indonesia yang tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Ilegal. Fungsi RUDENIM di kota Pekanbaru adalah salah satu contohnya:

1. Melaksanakan tugas pendetensian
2. Melaksanakan tugas pengisolasian
3. Melaksanakan tugas pemulangan dan pengusiran atau deportasi

Keimigrasian adalah istilah yang digunakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2011. Keimigrasian mengacu pada orang yang masuk atau keluar Indonesia, dan orang yang menjaganya dalam proses menjaga keamanan negara. Pasal 3 Fungsi Keimigrasian merupakan bagian dari tujuan pemerintah untuk memberikan bantuan keimigrasian, penegakan hukum, dan perlindungan negara.

Kurang dari setahun kemudian, Undang-undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang mengatur 1 ayat 33. Rudenim adalah unit yang bergerak di bidang teknologi. Keimigrasian menjalankan fungsi keimigrasian sebagai tempat tinggal sementara bagi orang asing yang harus melalui administrasi keimigrasian. Ini nama gedungnya.

Ketentuan yang sama berlaku untuk Pasal 1 ayat 35. Deteni adalah orang dari negara lain yang ditahan di rumah tahanan Kantor Imigrasi atau Rudenim. Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.1917-OT.02.01 tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Rumah Detensi Imigrasi mengatur tentang tata cara di Rudenim yang meliputi penahanan, restitusi, dan sanksi, serta tata cara penanganannya. mengeluarkan tahanan dari negara tersebut, serta bagaimana cara mengembalikan mereka.

Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru harus berurusan dengan banyak orang yang datang ke kota itu karena berwenang yang terjadi dan fakta bahwa ada begitu banyak orang yang datang ke kota itu karena kota itu harus begitu banyak orang yang datang karena fakta bahwa ada begitu banyak sumber

Orang-orang di Pekanbaru, Indonesia, sedang diperiksa oleh Keimigrasian (Rudenim) karena keputusan Presiden 125 Tahun 2016 tentang orang yang datang dari luar negeri untuk tinggal di Pekanbaru. Keamanan dan Ketertiban keimigrasian vs. Pengungsi melakukan beberapa hal setiap hari untuk menjaga keamanan orang yang menginap di hotel.

Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi No. IMI.1917 OT.02.01 Tahun 2013

tentang Tata Cara Pelaksanaan Rumah Detensi Imigrasi. Dikatakan bahwa kepala bidang Penempatan, Keamanan, Pemulangan, dan Deportasi atau kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban bertanggung jawab atas proses tersebut:

1. Memudahkan orang mengunjungi keluarganya, belajar hukum, dan berobat ke dokter, rohaniwan, dan satpam setelah mendapat izin dari Ratu Rudenim.
2. Selain memudahkan pengunjung yang datang, pemerintah juga mempermudah orang yang bekerja untuk pemerintah untuk datang. Ini termasuk orang-orang yang bekerja untuk pemerintah, serta orang-orang dari negara lain yang bekerja untuk pemerintah. Setelah mendapat izin dari pemerintah, mereka bisa datang.
3. Wartawan hanya dapat merekam hal-hal yang terjadi pada Deteni jika mendapat izin dari Kepala Rudenim.
4. Buat salinan dari buku yang sedang Anda baca, termasuk nama, usia, dan pekerjaan orang yang membacanya, serta tanggal dan waktu orang yang membacanya. Deteni yang sedang dibaca juga perlu disertakan.
5. Mengizinkan atau menolak izin pergi yang diminta Deteni karena keperluan pemeriksaan keimigrasian atau kesehatan, pembuatan dokumen perjalanan,

kunjungan kerabat di Indonesia, atau agar mereka tinggal di Indonesia.

6. Ketika izin untuk pergi sebentar diberikan, Kepala Rudenim mengirimkan surat dengan informasi tentang tujuan dan waktu kunjungan
7. Petugas Rudenim membantunya mendapatkan izin untuk pergi sebentar.

Orang yang bekerja di pusat penahanan di Pekanbaru, Indonesia, melakukan hal-hal seperti memeriksa orang dan memastikan mereka aman. Mereka menemukan bahwa ada ketidaksesuaian antara apa yang dikatakan SOP dan apa yang dikatakan orang, sehingga mereka mengubah SOP. Sebagaimana diarahkan oleh Direktur Imigrasi Nomor Imi.1917-Ot.02.01 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Penahanan Rumah Imigran. Jika izin pergi untuk waktu yang singkat diberikan, Kepala Rudenim menulis surat izin untuk pergi untuk waktu yang singkat. Ia juga menuliskan tujuan dan waktu kunjungannya. Sementara itu, ketika seseorang yang ditahan pergi ke Rudenim, dia tidak mendapatkan izin untuk pergi dengan surat yang mengatakan dia bisa. Sebaliknya, dia harus menuliskan tujuannya dan waktu dia berada di sana.

Dulu, orang-orang yang ditahan sering terlihat berjalan-jalan di kawasan seperti Jalan Sudirman, Gedung Guru, MTQ, dan lainnya. Petugas Pegawai Rudenim membantu proses pengurusan izin keberangkatan. Namun, proses pengurusan izin cuti itu tidak dilakukan petugas kasarnim. Sebaliknya, proses itu dilakukan oleh deteni yang bisa pergi dan oleh orang yang masih bisa pergi meski sudah pukul 23.00 malam.

Direktorat Yudisial Imigrasi (DJI) telah menetapkan Standar Prosedur Operasional (SOP) Rudenim yang dituangkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI.1917. OT.02.01 Tahun 2013. Untuk memastikan kelancaran transisi bagi pegawai Deteni, SOP dikembangkan dengan tujuan memberikan kejelasan dan kemudahan pemahaman bagi mereka yang bekerja di departemen pendetensian, pengisolasian, dan pendeportasian/pemuatan Deteni Saat menerapkan SOP tersebut, penting untuk

dicatat bahwa hal itu dilakukan dengan hati-hati dan metodis untuk menghindari kebingungan.

Rudenim harus memenuhi sejumlah standar, di antaranya penyediaan udara bersih, makanan, dan perawatan kesehatan. Senada dengan itu, Peraturan Direktorat Imigrasi Nomor IMI.1917-OT.02.01 tanggal 1 Februari 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Rumah Detensi Imigrasi Rudenim disebutkan bahwa Rudenim harus mematuhi beberapa standar, di antaranya penyediaan udara bersih, makanan, dan perawatan kesehatan.

Sementara itu, Kepala Rudenim akan berkomunikasi dengan para tahanan, menjelaskan tujuan kunjungan dan lamanya waktu kunjungan. Pengawasan Rudenim terlibat dalam pelaksanaan Izin Keluar karena pelaksanaan Izin Keluar sedang berlangsung. Namun, berdasarkan realitas sosial saat ini, pemerintah Indonesia tidak mampu memberikan pelayanan yang memadai kepada masyarakat dan tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat luas, termasuk memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat luas.

Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Rudenim, maka seluruh insan Rudenim perlu bekerja sama secara kooperatif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kinerja adalah situasi di mana kinerja dan kemampuan seseorang diamati.

Salah satu isu yang mengemuka di kota Pekanbaru dalam kaitannya dengan pengungsi adalah adanya ketidaksesuaian antara Standard Operating Procedure (SOP) RUDENIM dengan peraturan perundang-undangan yang terkait. Akibatnya, banyak Pengungsi yang melaksanakan tata tertib camping-camping yang telah disusun dan dilaksanakan oleh administrasi Rudenim di Pekanbaru.

Berikut daftar lengkap tahanan untuk tahun 2021, termasuk status mereka saat ini di lapas Rudenim di kota Pekanbaru.

**Tabel 1. Jumlah Pengungsi dibawah Pengawasan Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru 2021**

NO	KEWARGANEGARAAN	JUMLAH
1	Afghanistan	796
2	Bangladesh	5
3	Sri Lanka	3
4	Iraq	17

5	Iran	16
6	Singapura	1
7	Myanmar	34
8	PaIestina	12
9	SomaIia	13
10	Pakistan	19
11	Sudan	26
<b>TOTAL</b>		<b>942</b>

Sumber: Rumah Detensi Pekanbaru 2021

**Tabel 2 Status Deteni di Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru**

NO	Status	Jumlah
1	Pengungsi	928 Orang
2	Immigratoir	7 Orang
3	Final Rejected	7 Orang
<b>TOTAL</b>		<b>942 Orang</b>

Sumber: Rumah Detensi Pekanbaru 2021

Menurut Siagian (2003:2), administrasi diartikan sebagai “keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan pada rasionalitas individu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya”. Administrasi memiliki potensi untuk menjadi seni dan ilmu itu sendiri, dengan masing-masing administrasi memiliki masalah sendiri yang harus dihadapi, seperti banyak orang, tenggat waktu yang tidak dapat dipenuhi, daftar tugas yang harus diselesaikan, dan seperangkat aturan dan peraturan yang harus diikuti untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut.

Dalam Hanim (2005:2), Iuther menegaskan bahwa administrasi ditandai dengan pemenuhan tugas-tugas tertentu dalam hubungannya dengan pencapaian tujuan tertentu. Oleh karena itu, Atmosudirjo dalam Zulkifli (2005:17) menegaskan bahwa administrasi adalah serangkaian kegiatan tersendiri dan berbeda yang dilakukan dalam rangka mendirikan, memelihara, dan meningkatkan organisasi kontemporer yang juga merupakan sumber kebanggaan.

Jones (dalam Zulkifli 2009:14) mendefinisikan organisasi sebagai alat yang dapat digunakan oleh individu dan kegembiraan bagi organisasinya. Anggota. Menurut Sialahi dalam Zulkifli (2005:19), administrasi adalah suatu usaha bersama yang dilakukan oleh sekelompok orang berdasarkan

hasil pekerjaannya, yang diorganisasikan ke dalam suatu struktur dan didukung oleh berbagai sumber daya untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. adalah efektif dan efisien. Menurut Fathoni (2006:5), perencanaan administrasi adalah suatu proses yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Istilah “administrasi” dapat diartikan sebagai usaha bersama dua orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Ada sejumlah faktor yang berperan dalam definisi yang diberikan di sini.

- a) Faktanya, istilah "administrator" mengacu pada proses yang hanya dipahami pada tahap awal dan tidak dipahami sama sekali di kemudian hari.
- b) Adanya dua manusia atau lebih, adanya tujuan yang ingin dituju, adanya tugas atau tugas-tugas yang harus ditunjukkan, adanya peralatan untuk membantu tugas-tugas itu, adanya tugas atau tug
- c) Sebagai hasil dari fakta bahwa ia telah berkembang sejalan dengan perkembangan umat manusia, administrasi sebagai proses yang berkelanjutan bukanlah sesuatu yang baru bagi dunia. (2004 S. Psiagian, 2004:2).

Sekelompok orang untuk mencapai satu atau serangkaian tujuan. lebih khusus lagi, menurut Messie (dalam Zulkifli 2009:14), organisasi didefinisikan sebagai sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dengan berbagi tugas, memelihara rasa kebersamaan, dan melakukan kegiatan yang berkontribusi terhadap pencapaian tersebut. dari tujuan.

Siagian (2003:6) mendefinisikan struktur organisasi sebagai segala bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih yang diformalkan dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam hal ini, ada satu orang atau lebih di bagian atas hierarki, dan satu orang atau lebih di bagian bawah hierarki. Dalam hal ini, ada satu atau lebih orang di puncak hierarki. Dengan kata lain, istilah "manajemen puncak" mengacu pada tingkat manajemen tertinggi dalam suatu organisasi,

yang dibagi menjadi tiga kategori: manajemen atas, menengah, dan bawah.

Indrasatuti (2017;1) mendefinisikan manajemen sumber daya manusia (MSDM) sebagai istilah yang berasal dari kata "manajemen" dan "sumber daya manusia". Proses manajemen, menurut Stoner (sebagaimana dikutip dalam Zulkifli 2005;28), terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, dan evaluasi kegiatan karyawan organisasi, serta dalam pemanfaatan semua sumber daya organisasi, dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses pengelolaan, menurut George R. Terry (dikutip dalam Zulkifli, 2009;18), terdiri dari tahapan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian dan digolongkan sebagai ikhas. Di setiap bidang, manajemen dapat diterapkan, dan dimungkinkan untuk melakukan tugas tepat waktu dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip yang telah struktur dengan bagian yang serupa dengan bagian struktur lainnya sampai seluruh struktur dipengaruhi oleh bagian lainnya.

Menurut Hasibuan (2006;255), manajemen adalah studi dan praktik pengorganisasian proses mengubah bahan mentah menjadi produk dan jasa yang berguna untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam proses manajemen, ada berbagai jenis fungsi yang selalu ada dan ditangani oleh administrator atau manajer untuk mencapai hasil yang diinginkan. Fungsi manajemen merupakan suatu unsur-unsur dasar yang selalu ada dan diatur dalam proses manajemen.

Menurut Paul Hersey dan Ken Blanchard (1995:4) dalam Baddy, setiap fungsi dalam organisasi relevan dengan setiap jenis organisasi atau tingkat manajemen. Tujuan individu, organisasi, dan masyarakat semuanya tercapai melalui penerapan dan pemeliharaan sistem pengelolaan sumber daya manusia. Menurut Sedarmayanti (2009), aspek terpenting dalam pengelolaan sumber daya manusia adalah peningkatan efektivitas dan efisiensi organisasi untuk mencapai berbagai tujuan baik individu, organisasi, maupun masyarakat umum. Dalam konteks ini, manajemen mengacu pada fungsi yang terkait erat dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan dari proyek tertentu yang

dilakukan oleh orang lain di negara yang sama. Sedarmayanti adalah dewi Hindu (2009;4).

Menurut PasoIong (2010;57), pelaksanaan adalah proses mengubah suatu peristiwa tertentu menjadi situasi latihan, berfungsi sebagai rangkuman untuk berbagai tugas yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan program, dan menggunakan metode alternatif untuk mencapai tujuan strategis. Siagian (2002;126) berpendapat

bahwa penyelesaian tugas adalah kegiatan yang didasarkan pada pencapaian tujuan dan pemeliharaan sikap positif sesuai dengan situasi saat ini. Setiawan (2004) mendefinisikan implementasi sebagai suatu proses yang harus diikuti untuk mencapai suatu tujuan, serta terciptanya sistem tata kelola yang efektif untuk pembangunan suatu bangunan. Menurut Setiawan (2004) implementasi didefinisikan sebagai proses memastikan bahwa tujuan dan sasaran proyek terpenuhi sekaligus memastikan bahwa anggaran proyek terpenuhi. Seperti yang didefinisikan oleh Harsono (2002) dalam bukunya Implementasi Kebijakan dan Pendapat Pelaksanaan, proses penyelesaian tugas.

Dari hasil pengamatan yang dilakukan peneliti menemukan beberapa fenomena-fenomena yang berhubungan dengan kinerja petugas Rudenim:

1. Pengungsi bekerja di tempat umum, yaitu jalan di trotoar Jalan Jend. Sudirman, Gedung Guru Jend. Sudirman, MTQ, dan lainnya, masih banyak dijumpai ditempat-tempat umum, yaitu trotoar jalan khusus
2. Sering dijumpai para pengungsi sering tanpa pengawasan oleh pihak Rudenim di hari izin keluar dan sering dijumpai mereka keluar bersama pengungsu atau bersama keluarga mereka.
3. Sering dijumpai para pengungsi sering tanpa pengawan
4. Izin Keluar tahanan diberikan oleh Petugas Rudenim antara jam 08.00 WIB dan 19.00 WIB setiap hari, dengan jumlah waktu maksimum yang diperbolehkan bagi tahanan untuk menyelesaikan keluar mereka adalah tiga jam setiap hari. Meski demikian, jika petugas penjaga akomodasi atau CH tersebut melewati batas waktu, dia tidak akan diberitahu..

Dari beberapa fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Petugas Rudenim khususnya Seksi Keamanan dan Ketertiban tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Standar Operasional Kepolisian. Salah satu contohnya adalah deteni yang melakukan kunjungan keluar tidak diberikan surat izin keluar tertulis dari kepala Rudenim dan tidak diberikan oleh karena permasalahan dan fenomena yang telah teridentifikasi selama ini, maka peneliti bersemangat untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang masalah ini “Pelaksanaan Tugas Seksi Keamanan Dan Ketertiban Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru”

**METODE**

Tipe penelitian adalah deskriptif. Karena peneliti bermaksud untuk mengetahui hasil analisa dan informasi yang detail terhadap pada objek penelitian. Peneliti deskriptif bertujuan untuk menggambarkan keadaan sesungguhnya atau yang sebenarnya tentang bagaimanakah Pelaksanaan Tugas Seksi Keamanan Dan Ketertiban Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru.

Kemudian metode yang digunakan didalam penyusunan penelitian ini yaitu metodologi kuantitatif. Hal ini dikarenakan metode penelitian kuantitatif menurut Sugiono (2013, hal, 16) dapat diartikan sebagai penelitian didasarkan pada filsafat positivism, dan digunakan untuk meneliti populasi dan sampel tertentu, pengumpulan

data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif.

Lokasi penelitian dipilih di berbagai penginapan dan Rumah Detensi yang mengakibatkan dilaksanakannya suatu kebijakan dalam rangka administrasi diartikan sebagai proses pelaksanaan tugas yang mengakibatkan terlaksananya suatu kebijakan. sebuah kebijakan dalam konteks administrasi. Suatu kebijakan sedang dikembangkan sebagai bagian dari pengembangan program secara keseluruhan Imigrasi Pekanbaru (RUDENIM) Pekanbaru.

Selain itu, penulis juga telah mengidentifikasi sejumlah lokasi yang menjadi tempat kunjungan keluar sejumlah besar tahanan, seperti Trotoar Jalan Jend. Sudirman, Gedung Guru Jend. Sudirman, MTQ, dan Ramayana Pekanbaru yang kesemuanya mengalami peningkatan aktivitas dari Seksi Keamanan dan Ketertiban Rudenim Kota Pekanbaru.

Dalam konteks ini, Sampel mengacu pada bagian terkecil dari ukuran dan karakteristik populasi, yang diwakili oleh kata "sampler" (Sugiyono, 2006:9). Orang yang paling banyak penduduknya dan sampelnya yang terlibat dalam penyelidikan ini adalah Kepala Rudenim, pejabat struktural berupa Kepala Seksi Keamanan & Ketertiban, dan pejabat fungsional berupa Kepala Subseksi Keamanan, yang terdiri dari wakil Komandan Jaga Keimigrasian. dan Petugas Pengaman pengungsi sebagai orang asing yang berbasis di kota.

**Tabel 3. Populasi dan Sampel Penelitian**

No	Sub Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Rudenim	1	1	100%
2	Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban	1	1	100%
3	Kepala Subseksi Keamanan	1	1	100%
4	Kepala Subseksi Ketertiban	1	1	100%
5	Komando Jaga Keimigrasian	4	4	100%
6	Pengungsi	928	46	5%
<b>Total</b>		<b>936</b>	<b>54</b>	

Sumber: Modifikasi Peneliti, 2021

Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, kuesioner, dokumentasi dan observasi, seluruh data yang terkumpul dikelompokkan menurut jenis dan dianalisa secara deskriptif dan dapat ditarik kesimpulan hasil penelitian.



**HASIL DAN PEMBAHASAN**  
**Hasil Penelitian Pelaksanaan Tugas Seksi**  
**Keamanan Dan Ketertiban Rumah Detensi**  
**Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru**

**Tabel 4. Rekapitulasi Tanggapan Responden Petugas Mengenai Indikator Pelaksanaan Tugas Seksi Keamanan Dan Ketertiban Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) Pekanbaru**

No	Item yang dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Pengamanan	7 (100%)	-	-	7
2	Pelayanan	7 (100%)	-	-	7
3	Disposisi	6 (86%)	1 (14%)	-	7
Jumlah		20	1	-	21
Rata-rata		6,6	0,3	-	7
Persentase		94%	6%	-	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian, 2021

Dari table 4 diketahui bahwa tanggapan responden petugas mengenai Indikator Pelaksanaan Tugas Seksi Keamanan dan Ketertiban yang pertama yaitu pengamanan kategori penilaian terlaksana adalah 7 orang atau setara 100%, untuk kategori cukup terlaksana tidak ada jawaban, sama halnya dengan kategori kurang terlaksana tidak ada juga yang menjawab.

Untuk indikator pelaksanaan tugas seksi keamanan dan ketertiban yang kedua adalah pelayanan dengan kategori penilaian terlaksana adalah 7 orang atau setara 100%, untuk kategori cukup terlaksana tidak ada jawaban, sama halnya dengan kategori kurang terlaksana tidak ada juga yang menjawab. Selanjutnya untuk indikator yang terakhir yaitu disposisi dengan kategori terlaksana 6 orang atau setara 86%, dan kategori cukup terlaksana adalah 1 orang atau setara 14%, selanjutnya kurang terlaksana tidak ada yang menjawab.

Kesimpulan dari rekapitulasi tanggapan responden petugas terhadap indikator pelaksanaan tugas seksi keamanan

dan ketertiban Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru untuk kategori penilaian Terlaksana adalah sebesar 94%, untuk kategori cukup Terlaksana adalah sebesar 6% dan untuk kategori kurang Terlaksana tidak responden yang menjawab. Dari data tersebut dapat ditarek kesimpulan bahwa pelaksanaan tugas seksi keamanan dan ketertiban Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru telah Terlaksana, karena semua petugas telah mengetahui tujuan dari Rudenim sendiri beserta apa saja yang menjadi tugas dari mereka.

Untuk pengamanan dari pihak rudenim telah menempatkan petugas di pos penjagaan untuk menjaga para deteni dengan selalu melakukan pengawasan langsung dan apabila ada deteni yang izin keluar mereka juga harus mengisi buku izin keluar dan bagi para pengunjung yang datang harus mengisi juga buku khusus tamu. Dan bagi petugas seksi keamanan dan ketertiban yang melakukan penyimpangan akan mendapatkan sanksi dari Kepala Rudenim dan bagi para deteni yang melakukan pelanggaran deteni akan mendapatkan hukuman yaitu dengan di isolasi

**Tabel 5. Rekapitulasi Tanggapan Responden Deteni Mengenai Indikator Pelaksanaan Tugas Seksi Keamanan Dan Ketertiban Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) Pekanbaru**

No	Item yang dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Pengamanan	15 (33%)	25 (54%)	6 (13%)	46

2	Pelayanan	21 (46%)	19 (41%)	6 (13%)	46
3	Disposisi	17 (37%)	20 (43%)	9 (20%)	46
Jumlah		53	64	21	138
Rata-rata		18	21	7	46
Persentase		39%	46%	15%	100%

Sumber: Data olahan penulis 2022

Dari table 5 diketahui bahwa tanggapan responden deteni mengenai Indikator Pelaksanaan Tugas Seksi Keamanan dan Ketertiban yang pertama yaitu pengamanan kategori penilaian terlaksana adalah 15 orang atau setara 33%, untuk kategori cukup terlaksana adalah 25 orang atau setara 54%, sedangkan untuk kategori kurang terlaksana mendapatkan jumlah 6 orang atau setara 13%.

Untuk indikator pelaksanaan tugas seksi keamanan dan ketertiban yang kedua adalah pelayanan dengan kategori penilaian terlaksana adalah 21 orang atau setara 46%, dan untuk kategori cukup terlaksana adalah 19 orang atau setara 41%, sedangkan untuk kategori kurang terlaksana adalah 6 orang atau setara 13%.

Selanjutnya untuk indikator yang terakhir yaitu disposisi dengan kategori terlaksana 17 orang atau setara 37%, dan kategori cukup terlaksana adalah 20 orang atau setara 43%, selanjutnya kurang terlaksana adalah 9 orang atau setara 20%.

Kesimpulan dari rekapitulasi tanggapan responden terhadap indikator pelaksanaan tugas seksi keamanan dan ketertiban pada deteni di rumah detensi imigrasi Pekanbaru untuk kategori penilaian Terlaksana adalah sebesar 39%, untuk kategori cukup Terlaksana adalah sebesar 46% dan untuk kategori kurang Terlaksana adalah sebesar 15% dari total keseluruhan hasil dari para Deteni di Rudenim. Dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini termasuk pada kategori cukup Terlaksana dengan total persentase 46% sesuai dengan penjelasan sebelumnya tentang persentase 34-66% termasuk dalam kategori cukup Terlaksana, artinya belum semua indikator berjalan dengan baik.

Dalam penelitian ini hal menonjol dari tugas seksi keamanan dan ketertiban yang cukup Terlaksana adalah pada indikator pengamanan diketahui bahwasanya skill

yang dimiliki oleh pegawai seksi keamanan dan ketertiban adalah cukup memadai hal ini dikarenakan kurangnya pelatihan yang disediakan dari rudenim sendiri, kemudian tingkat pendidikan pegawai yang umumnya masih pada tingkat sekolah menengah atas. Kemampuan berbahasa asing yang masih minim merupakan salah satu penyebab kinerja pegawai seksi keamanan dan ketertiban pada deteni cukup terlaksana.

### **Hambatan Dalam Implementasi Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Penanganan Kebakaran Hutan Dan Lahan**

Dalam hal ini hambatan yang terdapat pada rudenim khususnya seksi keamanan dan ketertiban adalah kinerja yang masih kurang efektif dan efisien untuk itu inilah beberapa hal yang penulis temukan dalam penelitian Pelaksanaan Tugas seksi keamanan dan ketertiban Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) Pekanbaru pada deteni:

1. Dalam hal pembagian tugas tidak berjalan secara efektif disebabkan beberapa hal seperti pegawai seksi keamanan dan ketertiban melanjutkan pendidikan kemudian kekurangan staff, juga menjadi salah satu penyebab penambahan tugas lain, dalam artian keluar dari jabatan. Untuk menolong pekerjaan diseksi lain.
2. Terdapat situasi kesulitan komunikasi antar pegawai dengan para deteni tak jarang mereka menggunakan bahasa tubuh, karena pendidikan pegawai yang dominan lulusan SITA serta kemampuan dalam berbahasa asing masih kurang.
3. Menurut analisis penulis hal yang paling kurang efektif ialah perbandingan antara petugas seksi keamanan dan ketertiban dengan jumlah seluruh deteni yang berjumlah 942 orang.

## SIMPULAN

1. Untuk indikator disposisi kinerja seksi keamanan dan ketertiban, berada pada kategori cukup Terlaksana berdasarkan tanggapan dari deteni dan hasil observasi penulis, karena sebagian besar baik pejabat struktural dan pegawai seksi keamanan dan ketertiban mengetahui tujuan rudenim. Namun implementasinya masih sangat jauh dari yang seharusnya dilaksanakan sesuai ketentuan SOP. Selain itu beban kerja berupa waktu yang lebih dari batas maksimum kerja seorang individu dapat menyebabkan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai tidak berjalan dengan baik. Bahkan terkesan sembarangan.
2. Untuk indikator Pelayanan kinerja seksi keamanan dan ketertiban dari data rekapitulasi menurut deteni juga termasuk dalam kategori cukup Terlaksana, menurut pegawai seksi keamanan dan ketertiban pelayanan yang diberikan kepada deteni cukup Terlaksana. Hal tersebut dibenarkan oleh deteni dalam pelaksanaan izin keluar dengan prosedur yang mudah dan dengan tempat tujuan yang bebas asalkan masih dalam wilayah Pekanbaru deteni berhak melakukan kunjungan keluar. Sementara itu fasilitas yang disediakan oleh rudenim bagi kunjungan keluarga atau pemerintah negara asal deteni adalah cukup Terlaksana.
3. Untuk indikator Pengamanan berdasarkan data rekapitulasi kategori cukup Terlaksana menurut deteni berimbang dengan kategori Terlaksana menurut pejabat struktural dan pegawai seksi keamanan dan ketertiban umumnya semua item penilaian di jawab dengan baik namun. Sedangkan menurut pandangan deteni dalam hal disposisi, komunikasi antara pegawai dengan deteni adalah kurang Terlaksana mereka cenderung bersikap acuh tak acuh serta dengan kemampuan berbahasa Inggris yang minim mengakibatkan sulit berkomunikasi.

4. Kinerja Seksi Keamanan dan Ketertiban pada Deteni di Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) Pekanbaru dikategorikan cukup Terlaksana, dimana hal ini dapat dilihat pada tabel V.16 yaitu rekapitulasi indikator kinerja seksi keamanan dan ketertiban menurut deteni dan hasil observasi dari penulis terhadap keempat indikator penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Brantas, 2009. Dasar-dasar Manajemen. Bandung: Alfabeta
- Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama
- Fathoni, Abdurahmat. 2006. Manajemen Sumber daya Manusia. Jakarta; Rineka Cipta
- Gomes, Cardoso, Faustino. 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia.
- Hakim, Iukman. 2011. Pengantar Administrasi Pembangunan. Yogyakarta : ArRuzz Media
- Hasibuan, 2012. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta, Bumi Aksara.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2005. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Revisi. Cetakan ke 5. Bumi Aksara, Jakarta
- Indradi, Syamsiar, Sjamsuddin. 2016. *Dasar-Dasar dan Teori Administrasi Publik*. Malang: Intrans Publishing
- Indradi, Syamsiar Sjamsuddin. 2016. Dasar-Dasar dan Teori Administrasi Publik. Malang: Intrans Publishing
- Kusdi., 2011. Teori Organisasi dan Administrasi. Jakarta, Salemba Humanika
- Maksudi, Beddy Iriawan. 2017. *Dasar-Dasar Administrasi Publik*. Depok: PT Raja Grafindo Persada
- Maksudi, Beddy Iriawan. 2017. Dasar-Dasar Administrasi Publik. Depok: PT Raja Grafindo Persada
- PasoJong, Harbani, 2010. Teori Administrasi Publik. Bandung, Alfabeta Revisi. Cetakan ke 5. Bumi Aksara, Jakarta
- Siagian, P. Sondang. 2019. *Filsafat Administrasi* Edisi Revisi. Jakarta: PT Bumi
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Sule dan SefuHah, 2015. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana Yogyakarta, Andi.

Zulkifli dan Numasari. 2015. *Pengantar Manajemen*.  
Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing

Zulkifli, 2009. *Fungsi-Fungsi Manajemen*. Fispol Uir  
Pekanbaru

Zulkifli dan Yogja. 2014. *Fungsi-Fungsi Manajemen*.  
Pekanbaru.: Marpoyan Tujuh Publishing